

## BAB II

### KESETARAAN GENDER SEBAGAI PERMASALAHAN GLOBAL

#### 2.1 Dinamika Permasalahan MDGs menuju SDGs

Sebuah pembangunan dapat diartikan pada sebuah proses dalam berkesinambungnya diantara beberapa dimensi, seperti dimensi sosial, lingkungan, hingga ekonomi, yang pada pelaksanaannya bertujuan kepada terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Akan tetapi jika dilihat lagi, pembangunan yang sudah dilaksanakan pada saat ini atau selama ini malah cenderung dilakukan dengan cara semena-mena pada pengelolaan sumber daya alamnya dengan tidak memikirkan aspek lingkungan yang ada. Yang pada akhirnya hal tersebut malah menimbulkan dampak yang besar dalam kerusakan alam itu hingga ekosistem alam yang murni. Tak hanya berdampak pada keberlangsungan ekosistem alam, tetapi juga kepada manusia yang hidup bersamaan dengan alam dengan banyaknya permasalahan lingkungan yang mengganggu keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri.<sup>22</sup>

Permasalahan lingkungan tersebut sebenarnya sudah menjadi suatu perhatian di kancah internasional dikarenakan banyaknya masalah yang muncul dari pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada akhirnya melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut

---

<sup>22</sup> Wahyuningsih. (2017). MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/>

membicarakan tentang semua isu-isu mengenai lingkungan hidup dan juga membicarakan tentang hubungan antara masalah lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan dan mencapai sebuah kesepakatan bersama didalamnya tentang lingkungan hidup.<sup>23</sup> Dan sejak saat itu sistematis dari konsep pembangunan akan lebih berfokus pada pembangunan ramah lingkungan yang pada pelaksanaannya dapat diimplementasikan di berbagai dunia. Yang pada akhirnya tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama negara anggotanya menyepakati suatu agenda pembangunan global dengan spesifikasi dan terarah yang dinamai sebagai *Millenium Development Goals* (MDGs).<sup>24</sup>

Pada awalnya program berkelanjutan *Millennium Development Goals* yang dibentuk pada tahun 2000 silam ini berfokus pada masalah-masalah dan pengembangan pada isu kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidakseimbangan gender, dan akses pendidikan. Yang mana isu-isu tersebut hadir pada kondisi dunia saat itu, yang membuat PBB beserta jajarannya dengan melibatkan seluruh kepala negara dunia ingin memberikan sebuah kontribusi dalam hal pembangunan dunia yang berkelanjutan agar bisa di implementasikan dan di adopsi oleh negara-negara anggota di PBB.

Pada pelaksanaannya agenda pembangunan MDGs ini adalah bentuk dari komitmen semua negara yang berpartisipasi didalamnya untuk mewujudkan

---

<sup>23</sup> United Nations. (2012). *United Nations Conference on the Environment, Stockholm 1972*. United Nations. <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>

<sup>24</sup> Wahyuningsih. (2017). MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/>

kehidupan yang lebih layak lagi. Yang didalamnya turut melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat dan pemerintah di seluruh dunia. Pada MDGs sendiri tujuan-tujuan yang dibuat sangat amat beragam mulai dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga kesetaraan gender. Beberapa tujuan tersebut seperti, pengurangan terhadap angka kemiskinan dan kelaparan dunia, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender, memberantas angka kematian anak dan ibu, mengatasi penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS dan juga penyakit lainnya, juga lebih memfokuskan pada pelestarian dari lingkungan hidup dan membuat mitra pada pelaksanaan pembangunannya. Waktu tenggat dari pencapaian MDGs tersebut memiliki rentang waktu selama 15 tahun atau bisa diperkirakan hingga 2015. Negara-negara yang berkontribusi dalam konferensi tersebut harus berkomitmen dalam pengintegrasian MDGs sebagai salah satu upaya dalam suatu program nasional untuk menangani isu-isu yang menjadi permasalahan dunia pada saat itu dengan didasari oleh pemenuhan hak asasi dan juga kebebasan.<sup>25</sup>

Terdapat 189 negara yang menyepakati tentang pembangunan berkelanjutan yang di inisiasi oleh PBB tersebut, termasuk Indonesia sebagai negara anggota yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pembangunan berkelanjutan ini dirancang 15 tahun sekali mulai dari tahun 2000 untuk melihat perkembangan dalam isu-isu yang difokuskan untuk di selesaikan. PBB beranggapan bahwa dengan jangka waktu

---

<sup>25</sup> Wahyuningsih. (2017). MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/>

tersebut diharapkan dapat melihat perkembangan dan memberikan sebuah masukan apabila dirasa fokus atau tujuan tersebut dirasa belum tercapai.

Dalam upayanya, pencapaian MDGs merupakan suatu rangkaian proses jangka panjang dengan dinamika yang berkesinambungan. Yang pada proses implementasinya hal tersebut tidaklah mudah bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis moneter pada saat itu salah satunya ialah Indonesia. Indonesia memulai transisi dari memulihkan tatanan negaranya dari krisis multidimensional pada tahun 1997, kepada sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan melaksanakan seluruh reformasi pada seluruh bidang-bidang yang menopang kehidupan di Indonesia. Yang mana hal tersebut mengharuskan keselarasan kerjasama antara lapisan masyarakat seperti pemerintah, masyarakat, bidang perusahaan, politik, dan juga ranah akademisi. Tak hanya Indonesia, negara seperti Rusia hingga Korea Selatan pun mengalami keadaan yang tidak seimbang di negara mereka.<sup>26</sup>

Menelaah dari permasalahan tersebut sebenarnya dengan adanya MDGs ini memberikan ruang dan peluang bagi negara anggota dapat memperbaiki sistem dari negara mereka menjadi lebih stabil. Dikarenakan fokus dan konsep dari MDGs juga sebenarnya dapat membantu permasalahan di berbagai negara di karenakan mereka yang terdampak permasalahan atau isu yang difokuskan pada MDGs dapat langsung dibantu oleh bantuan resmi untuk pembangunan (ODA) dan donasi dari

---

<sup>26</sup> Wahyuningsih. (2017). MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390-399. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/>

negara-negara maju seperti Amerika Serikat dalam mencapai tujuan yang difokuskan pada MDGs tersebut.

Setelah selesainya masa dari *Millennium Development Goals* yang mempunyai waktu dari 2000 hingga 2015 silam, PBB beserta jajarannya mendeklarasikan untuk lebih memberikan kontribusinya pada perjalanan tersebut dengan membuat *Sustainable Development Goals*, dari kata “*Sustainable*” tersebut bisa di artikan bahwa PBB ingin memberikan pembangunan berkelanjutan dengan bagaimana mereka dapat mempertahankan hal tersebut untuk membangun dunia yang lebih baik.<sup>27</sup> Konsep dari *Sustainable Development Goals* tersebut memerlukan suatu kerangka pembangunan baru dalam mengakomodir seluruh perubahan yang sudah terjadi pasca habisnya masa dari MDGs di tahun 2015. Tujuan yang difokuskan pada pembangunan berkelanjutan tersebut mengarah pada menurunnya sumber daya alam, permasalahan lingkungan seperti rusaknya lingkungan yang diakibatkan dari penggunaan sumber daya alam yang semena-mena, perubahan iklim yang sangat signifikan, permasalahan food and energy security hingga pembangunan yang layak kepada kaum miskin. Konsep dari pembangunan berkelanjutan SDGs sangat berbeda dengan konsep dari MDGs yang implementasi nya hanya ditujukan kepada negara-negara berkembang, akantetapi pada SDGs tujuannya ditujukan lebih kearah yang universal. SDGs juga diharapkan

---

<sup>27</sup> BAPPEDA Kota Pontianak. (n.d.). *Habis MDGs Terbitlah SDGs: Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan*. Bappeda.pontianak.go.id. <https://bappeda.pontianak.go.id/berita/habis-mdgs-terbitlah-sdgs-menuju-pembangunan-yang-berkelanjutan>

sebagai sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang akan dapat menjawab semua permasalahan dan tantangan dunia di masa depan.<sup>28</sup>

Melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan lebih banyak fokus dan target dari pembangunan berkelanjutan yang awalnya hanya 8 Tujuan menjadi 17 tujuan dengan mengelaborasi banyak hal dan menelaah dari *trend* seluruh permasalahan dunia yang sedang terjadi. Beberapa isu-isu seperti ketidaksetaraan gender masih menjadi fokus utama dari pembangunan berkelanjutan tersebut. melihat dari banyaknya permasalahan perempuan di dunia tentang bagaimana masih banyak bentuk diskriminasi dan ketimpangan sosial yang di alami perempuan dunia pada saat itu.

Gambar 2. 1 Tujuan dari *Sustainable Development Goals*

(<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/71/19>)



<sup>28</sup> Wahyuningsih. (2017). MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 390–399. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/6479/4727/>

*Sustainable Development Goals* menambahkan setidaknya 17 tujuan seperti pada gambar diatas mulai dari permasalahan kemiskinan, kesetaraan gender, peningkatan kualitas pendidikan, hingga permasalahan lingkungan hidup yang menjadi isu penting pada permasalahan dunia sekarang. Melalui beberapa tujuan tersebut *Sustainable Development Goals* lebih memfokuskan lagi dari pembangunan berkelanjutan sebelumnya. Dengan menambahkan fokus-fokus baru untuk memperkuat proses pembangunan berkelanjutan di dunia menjadi lebih baik lagi. SDGs juga berpandangan bahwa semakin banyak fokus yang aka nada diharapkan bisa menyelesaikan isu-isu dan permasalahan di seluruh dunia. Berbeda dengan MDGs, pendanaan dari sistem pembangunan SDGs lebih luas dengan sumber pendanaan yang lebih beragam, termasuk investasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan mobilisasi sumber daya domestik. SDGs juga menekankan pentingnya kemitraan global untuk mencapai tujuan. Bisa di lihat bahwa sistem dari SDGs mengharuskan negara menjadi negara yang mandiri dengan melakukan suatu perputaran ekonomi yang tidak lagi dibantu dengan negara-negara maju dan lebih berfokus pada negara merka sendiri dengan mengedepankan negara berbasis mandiri agar tidak terlalu bergantung dengan negara lain.<sup>29</sup>

Perbedaan dari kedua pembangunan berkelanjutan tersebut juga dilihat dari perluasan cakupan dan kompleksitas, dimana MDGs lebih berfokus pada delapan

---

<sup>29</sup> Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius*, 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525/4134>

tujuan spesifik yang terutama menargetkan negara-negara berkembang dan juga lebih terfokus pada isu-isu mendesak seperti kemiskinan ekstrim dan kesehatan dasar. Sedangkan SDGs memiliki 17 tujuan baru yang mencakup spektrum isu yang lebih luas, termasuk kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, inovasi, dan pengurangan ketimpangan. SDGs juga lebih menargetkan semua negara, baik berkembang maupun maju, dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.<sup>30</sup> Tak hanya dari cakupannya, perbedaannya keduanya dapat dilihat juga dari proses penyusunan dan keterlibatan pemangku kepentingan, MDGs dikembangkan oleh sekelompok kecil ahli dan diplomat internasional dengan partisipasi terbatas dari pemangku kepentingan. Sedangkan SDGs dibentuk melalui proses konsultasi yang inklusif dan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan berbagai kelompok pemangku kepentingan lainnya di seluruh dunia.<sup>31</sup>

## **2.2 SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender**

Permasalahan ketimpangan gender menjadi salah satu isu yang dialami semua negara, dimana keberadaan gender perempuan masih menjadi di nomor 2 kan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan diskriminasi gender tersebut, hal inilah yang menjadikan tujuan kesetaraan gender di buat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sistem pembangunan berkelanjutan mereka di *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kesetaraan gender menjadi salah satu dari

---

<sup>30</sup> Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Jurnal Sosioreligius*, 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525/4134>

<sup>31</sup> *Ibid*



17 tujuan yang dibuat oleh PBB untuk memberikan sebuah kesetaraan dan keadilan gender yang ditargetkan dalam menghapuskan bentuk- bentuk permasalahan gender di dunia. Menelaah dari banyaknya kasus yang dialami oleh perempuan di dunia membuat ketidaksetaraan gender ini masih eksis dalam permasalahan global meskipun pemerintah sedang menanggulangi permasalahan tersebut, akan tetapi permasalahan tentang hal ini masih banyak didapati di negara-negara berkembang bahkan maju sekalipun.<sup>32</sup>

Perempuan dan anak perempuan selalu dipandang sebagai suatu komunitas yang hadirnya selalu terpinggirkan dan tidak mempunyai hak penuh dalam kesempatan hidup mereka sendiri. Perbedaan gender tersebut sangat berakibat pada pembatasan antara sosial dan norma yang berada di masyarakat dengan diikuti tradisi dari patriarki yang masih menjadi suatu paham yang melekat di masyarakat. Intensitas permasalahan tersebut masih banyak ditemukan di daerah pedesaan dibandingkan pada perkotaan. Dikarenakan pemahaman dan kondisi SDM yang masih belum merata antara perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan pemahaman dan adopsi patriarki tersebut masih ada dan masih menjadi suatu acuan hidup dalam berkeluarga dan bermasyarakat.<sup>33</sup>

Patriarki yang masih menjalar inilah yang menjadi alasan mengapa konsep dari kesetaraan gender ini dianggap menjadi suatu yang salah. Pada konsep patriarki masih beranggapan bahwa laki-laki itu kedudukannya lebih dominan daripada

---

<sup>32</sup> Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>

<sup>33</sup> *Ibid*

perempuan dan berada diatas dari perempuan tersebut. Dominasi dari laki-laki yang tercipta dari patriarki dapat dilihat bagaimana mereka yang mengatur dan beranggapan bahwa laki-laki dapat melakukan apa saja dibandingkan perempuan yang tidak memiliki kuasa atas hal tersebut.

Pada konsep tersebut lah ketimpangan gender hadir, dimana dominasi kaum laki-laki melemahkan kaum perempuan. Perempuan cenderung dibuat tidak berdaya peran dan keberadaanya. Padahal ketika ditelaah lagi, peran antara gender laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang setara karna mereka mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing, tidak ada yang seharusnya lebih tinggi dan lebih rendah keberadaanya. Alhasil dari isu patriarki hingga ketimpangan gender tersebut hadir lah tujuan SDGs 5 yang bertujuan bahwa kesetaraan gender itu harus ditegakkan agar tidak terjadinya sebuah diskriminasi dan permasalahan terhadap kaum perempuan.

Karena ketika kita melihat kesetaraan gender itu adalah sebuah prinsip dari hak asasi manusia, dimana hal tersebut merupakan persyaratan dalam melakukan sebuah pembangunan berkelanjutan yang lebih memusatkan pada masyarakat daripada tujuan itu sendiri. Sehingga dalam mencapai sebuah kesetaraan gender di berbagai level masyarakat menjadi suatu tujuan utama dan menjadi perhatian penuh dalam hal inisiatif pembangunan berkelanjutan. Tujuan 5 kesetaraan gender dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung bahwa mereka berkomitmen dalam mewujudkan sebuah keadilan gender dan kesetaraan melalui pemberdayaan perempuan dan anak di semua bidang masyarakat, dan juga memberikan sebuah pengertian bahwa segala bentuk tindak

kejahatan dan diskriminasi terhadap perempuan itu harus dihapuskan. PBB beranggapan juga, dengan adanya tujuan 5 ini akan memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada point-point SDGs lainnya. Sehingga dalam menghadapi dan mengimplementasikan agenda tersebut diharapkan kontribusi penuh dari semua pemerintah dunia dan juga perlu adanya dukungan beserta kolaborasi dari berbagai pemangku kebijakan baik publik, swasta dan juga melibatkan masyarakat sipil.<sup>34</sup>

Status dari SDGs 5 mempunyai banyak variasi di berbagai belahan dunia baik pada sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pelaksanaan kesehatan, hingga ranah politik. Meskipun pada implementasinya banyak negara sudah mencapai suatu kesetaraan gender tersebut, bisa dilihat dari pendidikan dasar, biaya yang harus dikeluarkan oleh anak perempuan cenderung lebih besar di negara berkembang. Pada contohnya di Afrika Selatan angka partisipasi anak yang sudah dapat bersekolah meningkat sejak tahun 2005, akan tetapi jumlah dari partisipasi anak perempuan yang belum dapat bersekolah masih sangat tinggi dibandingkan dari laki-laki. Dikarenakan faktor dari keluarga yang mempunyai penghasilan lebih rendah cenderung berpandangan untuk berinvestasi kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan itu sendiri. Karena mereka berfikir bahwa ketika mengirimkan anak perempuan ke sekolah dapat menghilangkan tenaga kerja yang ada dirumah, dikarenakan perempuan masih dipandang sebagai sebuah gender yang hadirnya hanya untuk mengurus permasalahan domestik saja. Sedangkan pada negara maju, anak perempuan dan perempuan lebih memiliki akses kepada

---

<sup>34</sup> Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>

pendidikan yang lebih luas dibandingkan negara berkembang. Faktor dari keterlibatan sumber daya manusia mempengaruhi permasalahan berikut. Tak hanya di bidang pendidikan pada industri pariwisata pun ketidakadilan gender muncul. Seperti peran dari perempuan sendiri lebih ditempatkan pada pekerjaan tingkat rendah dengan gaji atau upah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan.<sup>35</sup>

SDGs 5 mempunyai banyak target dan indikator yang menunjang dalam keberlangsungan dari kesetaraan gender tersebut. Beberapa indikator yang menunjang target tersebut ialah :



---

<sup>35</sup> UNICEF. (2015). *Gender Equality in East & South Africa* . Unicef.org. <https://www.unicef.org/esa/gender-equality>

Gambar 2. 2 Target & Indikator dari SDGs 5 Kesetaraan Gender

(<https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/5901/pdf>)

Target	Indikator
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun	5.1.1. Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1. Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun
5.4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional	5.4.1. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah 5.5.2. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-	5.6.1. Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan 5.6.2. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan,

dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi
5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional	5.a.1. (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan  5.a.2. Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
5.c. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	5.c.1. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Melalui target-target indikator yang menopang tersebut, diharapkan menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender itu sendiri.

### 2.2.1 Target 5.2 Penghapusan Seluruh Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan SDGs 5 kesetaraan gender berfokus pada menciptakan keadilan gender dan menghapuskan seluruh bentuk dari seluruh kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan memfokuskan pada pemberdayaan terhadap

perempuan itu sendiri. Akan tetapi pada tujuan dari SDG 5 mempunyai beberapa target yang menunjang agar terciptanya kesetaraan gender tersebut. pada beberapa target tersebut target 5.2 difokuskan dalam menghapuskan dan juga memberantas semua bentuk dari kekerasan terhadap perempuan, dikarenakan masih banyaknya tindak kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh perempuan di berbagai negara.<sup>36</sup>

Gambar 2. 3 Target 5.2 Pada SDGs 5 Kesetaraan gender

(<https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/download/5901/pdf>)

Target	Indikator
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir 5.2.2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

Melalui tabel target 5.2 diatas menjelaskan bahwa rencana dari penghapusan pada semua bentuk kekerasan terhadap perempuan mulai

<sup>36</sup> Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021) [Indonesia's Commitment on the Implementation of SDGs Number 5 to Guarantee Human Security Especially Women (2015-2021)]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 14(27), 1–17. <https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5901>

dari ranah public dan pribadi termasuk juga perdagangan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual dan lain lain itu termasuk salah satu target yang menyongsong tujuan dari kesetaraan gender itu sendiri. Dengan terhapusnya semua tindak kekerasan tersebut menjadikan perempuan aman dan memberikan ruang aman dalam menjalankan kehidupannya.

Target 5.2 juga mempunyai indikator seperti Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dan juga Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir yang bermaksud bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh beberapa indikator tersebut harus dihapuskan agar terciptanya keadilan dan kesetaraan gender yang sudah di inisiasi oleh PBB.

### **2.3 Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)**

Pengarusutamaan gender (PUG) atau dalam bahasa inggris "*Gender Mainstreaming*" ini merupakan suatu hal yang atau langkah yang mengacu pada hal mewujudkan kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan dalam semua aspek dalam hal pembuatan kebijakan, pemutusan masalah hingga bagaimana mereka dapat memperlihatkan bahwa gender perempuan itu berada sama setara dengan laki-laki. Istilah dari pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming



ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada *"Beijing Platform of Action"* yang bahwasanya pengarusutamaan gender ini ialah suatu agenda global komprehensif dan transformatif dalam mewujudkan dan mencapai kesetaraan gender beserta pemberdayaan pada perempuan dan anak perempuan. Pada saat itu semua negara peserta termasuk Indonesia dan beberapa organisasi yang berhadir pada konferensi tersebut mendukung penuh pada aksi untuk mengimplementasikan *"Gender Mainstreaming"* tersebut di negaranya masing-masing. Pengarusutamaan Gender (PUG) juga sebenarnya dapat diartikan pada suatu langkah dan strategi dalam mencapai suatu keadilan dan kesetaraan gender melalui suatu program dan juga kebijakan yang implementasiannya memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pengalaman, aspirasi, kebutuhan dalam permasalahan antara kaum perempuan dan laki-laki ke dalam sebuah rancangan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan juga menelaah pada evaluasi dari seluruh rancangan program hingga kebijakan yang akan diolah di dalam berbagai bidang-bidang pembangunan serta kehidupan bernegara. Pengarusutamaan gender juga memberikan strategi yang dianggap rasional dan juga sistematis dalam hal mewujudkan dan menciptakan keadilan dan kesetaraan gender pada suatu negara. Salah satu aspek yang selalu di telaah adalah pada aspek kehidupan manusia seperti melaksanakan rumah tangga, bermasyarakat juga bernegara.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(2962-6749). <https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>.

Pemerintah menggunakan konsep ini untuk mencapai kesetaraan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai program dan kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal tersebut pun digadang dapat membuat kesetaraan gender yang diharapkan dikarenakan yang kita tahu bahwa kesenjangan gender masih menghantui perempuan di dunia hingga saat ini.<sup>38</sup> Dengan adanya konsep Pengarusutamaan gender (PUG), atau bisa kita sebut sebagai “*Gender Mainstreaming*” akan memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan,
2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
3. Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan
4. Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Tujuan akhir dalam pelaksanaan dari pengarusutamaan gender (PUG) ialah transformasi dari suatu keadaan yang tidak setara antara kaum perempuan dan laki-laki pada hak dan aspek sosial, menjadi setara bagi ke duanya serta terpenuhinya segala bentuk kebutuhan yang seharusnya didapatkan dari perempuan terhadap laki-laki. Sebenarnya ketika ditelaah strategi dalam pengarusutamaan gender ini tidaklah sama dengan konsep dari pemberdayaan perempuan dikarenakan dalam pelaksanaannya pengarusutamaan gender memerlukan perubahan yang signifikan pada agendanya. Perubahan yang dimaksud adalah seperti berkurangnya kesenjangan sosial antara kaum perempuan dan laki-laki hingga akses dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

mendapatkan manfaat pembangunan serta turut andilnya perempuan dalam proses pembangunan pada suatu negara.<sup>39</sup>Menelaah pada konsep pengarusutamaan gender tersebut memberikan gambaran bahwa peran atau kehadiran dari pemerintah harus melibatkan perempuan juga dalam penyelesaiannya dan tidak boleh ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan suatu negara.



---

<sup>39</sup> Valentina, A. (2019). ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.4887>